

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MENUMBUHKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pentingnya dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti budaya turun temurun, setiap generasi korupsi pasti ada di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga sekarang. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan bisa menghancurkan Negara ini. Dalam membrantas korupsi tentu semua lapisan masyarakat harus ikut andil, upaya pembrantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja. Oleh karena itu, dalam memberantas korupsi tentu harus melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Bagi generasi muda mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi itu penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa itu korupsi dan bagaimana pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Penalaran berbagai persepsi negatif terhadap arah pendidikan kebangsaan yang selama ini dianggap belum mencirikan kepribadian bangsa, terutama tentang hasil pendidikan yang cenderung tidak mencerminkan nilai dan prinsip antikorupsi, sehingga melalui pendidikan formal harus ada peningkatan dalam hal intensitas. Secara sederhana, sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Tindakan pencegahan bisa secara tidak langsung melewati dua pendekatan, pertama: menargetkan pembelajar, dan kedua: memanfaatkan pemberdayaan peserta didik untuk mengurangi lingkungan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi sangat penting dalam menumbuhkan budaya anti korupsi.

Kata Kunci : *Pendidikan Anti Korupsi, Penting, Memberantas*

Abstract

This research discusses the importance of cultivating an anti culture. At present corruption in Indonesia is like a hereditary culture, every generation of corruption must have existed in Indonesia since the royal era until now. This cannot be left alone, because if left unchecked it can destroy this country. In eradicating corruption, of course all levels of society must take part, efforts to eradicate corruption are a shared responsibility, not just the government. Therefore, eradicating corruption must involve all relevant stakeholders, namely the government, the private sector and the community. In order to provide sufficient knowledge about what corruption is and its eradication and instill anti-corruption values, it is important for students to receive Anti-Corruption Education. The reasoning for various negative perceptions of the direction of national education which so far is considered not to characterize the nation's personality, especially regarding educational outcomes which tend not to reflect anti-corruption values and principles, so that there must be an increase in intensity through formal education. To put it simply, Indonesia's formal education system has the potential to contribute to addressing the need to combat corruption. Indirect preventive action can be accomplished in one of two ways: focusing on students, and secondly: using understudy

strengthening to diminish the debasement climate. The results of this study indicate that Anti-Corruption Education is very important in fostering an anti-corruption culture.

Keywords : *Anti-Corruption Education, Important, Eradicate*

PENDAHULUAN

Saat ini korupsi di Indonesia sangat marak terjadi, tidak hanya korupsi tapi juga kolusi dan pungli juga marak terjadi. Korupsi, pungli dan kolusi sama-sama mengancam kesatuan dan persatuan Negara, hal tersebut terjadi karena ketiga perilaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, mengurangi wibawa negara dan pemerintah, serta mengakibatkan biaya ekonomi tinggi karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara. Penyebab adanya korupsi yaitu jika seseorang melanggar sumpah dengan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyat dan cita-cita yang seharusnya dia layani. Korupsi yang ada tidak hanya dari persoalan besar namun korupsi ada dari persoalan yang sepele yang jika dibiarkan juga akan menjadi persoalan besar. ¹

Korupsi tidak hanya menjadi masalah serius di tubuh pemerintahan, tetapi juga merupakan fenomena global yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan menghancurkan semua aspek kehidupan. Akibat dari adanya korupsi tidak hanya kepada kerugian materi tetapi juga dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Dalam upaya membrantas korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.

Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat adalah yang dimaksud dengan didefinisikan sebagai pendidikan dalam arti luas. Agar manusia menjadi pribadi yang sempurna jasmani dan rohani, maka pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal apabila menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa. ²

Saat ini pendidikan nampak kurang mementingkan kemanusiaan secara lahir dan batin secara utuh dan lebih mementingkan masalah ekonomi, materialistik, dan teknokratis, tanpa nilai-nilai moral, kemanusiaan, atau etika. Tidak diimbangi dengan

¹ Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2). Hal 329.

² Kadir, Yusrianto. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, Vol 1(1). Hal 25.

peningkatan intensif hati, perasaan, dan kecerdasan emosional, pendidikan lebih menitikberatkan pada kecerdasan intelektual, penalaran, dan keterampilan bernalar.

Dalam konteks ini, dianggap bahwa pendidikan kita telah menjadikan orang-orang oportunistik, munafik, hedonis, sombong, dan tidak memiliki kecerdasan, emosi, atau hati nurani. Tak heran jika orang-orang bergelar formal berpendidikan tinggi kerap terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara, seperti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, model pendidikan kita sampai saat ini setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap maraknya korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menempatkan bangsa kita di antara bangsa-bangsa dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Makna pendidikan yang sebenarnya adalah situasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan jati dirinya secara menyenangkan, terbuka, dan tidak terbatas tanpa terjerat dalam lingkungan yang monoton, kaku, atau tegang. Suka atau tidak suka, pendidikan kita belum menghasilkan generasi yang memiliki jati diri yang utuh. Pendidikan di Indonesia memang menghasilkan orang-orang yang pintar namun tidak sedikit mereka kehilangan sikap yang jujur dan rendah hati.

Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang meliputi indikator ahli, kreatif, inovatif, ahli berkualitas, dan sikap positif. Dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa dalam amanat pembukaan terdapat visi pendidikan di Indonesia mengacu pada landasan filosofis yang sangat dalam yang searah dengan HAM untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan secara hukum didasarkan pada filosofi pendidikan yang mengakui karakteristik pribadi yang unik dari setiap orang. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan anak di Indonesia secara implisit memasukkan kemungkinan untuk mewujudkan prinsip eksplorasi dan kecenderungan kreatif. Penjelasan diatas telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah masalah yang penting, yaitu bagaimana pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, metode ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) berupa buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran hukum generasi muda dalam mendorong perilaku antikorupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam mendorong perilaku antikorupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai kerugian materiil dan immateriil akibat korupsi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan. Secara materiil memang merugikan keuangan negara, tetapi secara immateriil terjadi kerugian moral dan mentalitas rakyat Indonesia yang sebenarnya paling sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan dilihat dari berbagai media bahwa korupsi di Indonesia pada hakekatnya sudah ada sejak zaman kerajaan dan berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Suhartono, seorang sejarawan UGM membicarakan hal ini dalam Seminar Hasil Riset Lintas Klaster Humaniora. Dia juga berbicara tentang bagaimana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak feodalisme. Menurut Suhartono, birokrasi tradisional yang

muncul pada masa feodal menjadi cikal bakal berkembangnya pola pikir korupsi. Selain menunjukkan bahwa sejarah korupsi Indonesia berakar pada struktur sosial negara yang sudah ada sebelumnya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan sosial budaya negara hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan korupsi bertahan selama puluhan abad. Dalam konteks ini, Suhartono menegaskan kecenderungan budaya Indonesia yang mentolerir perilaku koruptif tanpa pengawasan atau kontrol, yang telah menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sejak dulu.³

Theodore M. Smith, yang disebutkan dalam Mochtar Lubis dan James Scott, juga memberikan rincian tambahan mengenai sifat korupsi di Indonesia. Menurut analisa Theodore M. Smith, faktor budaya, ekonomi, dan politik menjadi penyebab sebagian besar masalah korupsi di Indonesia.

Selain itu, ia menekankan bahwa penyebab utama meluasnya korupsi di Indonesia adalah faktor sejarah yang dicontohkan oleh sifat feodal bangsa. Analisis selanjutnya membahas faktor-faktor tambahan, seperti faktor budaya yang berdampak negatif dari sistem feodal, faktor ekonomi yang tercermin dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, dari segi pemerintah yang strukturnya masih sentralistik, dan faktor politik yang kotor akibat keinginan untuk mengumpulkan uang bagi partai politik yang ingin memenangkan pemilu alasan di balik meningkatnya masalah korupsi di Indonesia.

Selain itu, faktor budaya seperti apa yang disebut oleh Wertheim sebagai penyumbang meluasnya korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wertheim menunjukkan bahwa ikatan patrimonial dalam budaya masyarakat dapat menyebabkan korupsi. Dia menjelaskan bahwa ketergantungan pada anggota keluarga seringkali lebih terlihat daripada dedikasi kepada masyarakat. Akibatnya, seseorang yang berada dalam posisi strategis seringkali memprioritaskan dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan kerabatnya. Kebiasaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan terus mencemari birokrasi modern hal ini mendorong nepotisme, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan korupsi terjadi dan menyebar.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya adalah fenomena yang telah ada selama beberapa abad dan merupakan persoalan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Korupsi dianggap sulit diatasi karena telah menjadi budaya, kecenderungan, gaya hidup seperti yang diungkapkan disebuah jurnal asing yang dikutip Amien Rais.

Pada prinsipnya, korupsi adalah perbuatan yang secara umum dilakukan dengan maksud mencari keuntungan. Suap, pemerasan, gratifikasi, dan taktik tidak etis lainnya sering digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan ini. Mengenai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa macam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,. Korupsi dengan cara yang dijelaskan di atas adalah perbuatan yang sudah umum dilakukan. Bentuk korupsi yang paling umum, menurut statistik KPK, adalah penyuapan. Korupsi pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua, disusul penyalahgunaan anggaran yang menempati urutan ketiga.

³ Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Hal 19.

Dampak Korupsi Bagi Negara

Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun dapat terjadi di semua Negara, tentu korupsi sangat berdampak buruk bagi suatu Negara. Menurut Ubi dan Scott (1984) setidaknya ada 10 dampak dari perbuatan korupsi dalam suatu Negara sebagai berikut: ⁴

1. Timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan.
2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipatgandaan biaya tambahan karena memberikan suap.
3. Jika korupsi berupa “komisi” maka mengakibatkan berkurangnya dana yang mestinya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Bila pegawai negeri menerima komisi 10 persen dari suatu kontrak tertentu maka hanya 90 persen dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.
4. Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kesopanan, moral dan akhlak karena setiap orang akan mempunyai pemikiran bahwa hanya ia saja yang harus memiliki akhlak yang tinggi.
5. Korupsi yang terjadi di golongan pemerintah dapat menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan meruntuhkan rasa hormat rakyat.
6. Ahli-ahli politik dan pegawai negeri sebagai golongan elit terlibat korupsi akan memberikan contoh bagi orang kecil untuk terus mengumpulkan apapun yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang-orang yang ada di dekatnya.
7. Korupsi menimbulkan keengganan otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populis bagi rakyat tetapi diperlukan untuk pertumbuhan. Pejabat yang korupsi pasti akan menolak untuk mengambil tindakan penting ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
8. Sejumlah strategi untuk memelihara hubungan khusus dalam rangka konsolidasi kekuasaan muncul sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya produktif yang seharusnya dilakukan untuk rakyat terabaikan.
9. Kemungkinan timbul fitnah dan tuduhan bagi individu yang jujur tidak bersedia mengambil perilaku curang yang akhirnya dapat memecah kesatuan para tokoh antikorupsi.
10. Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan budaya anti korupsi

Karakter bangsa sebagian besar dibentuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan, memberikan harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Istilah “pendidikan” diambil dari bahasa Yunani “paideia” (pedagogi), yang berarti pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya.

⁴ Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2). Hal 331.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berakal budi luhur. Pendidikan yang berbudi luhur bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi generasi penerus yang bermoral, tangguh, adil dan rendah hati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun karakter dan menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan bermartabat. Pembangunan karakter harus menjadi landasan utama pendidikan antikorupsi dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.⁵

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi akan sia-sia jika landasan utama pembentukan karakter hilang. Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk mencegah korupsi daripada memberantasnya dengan mendidik individu tentang perilaku antikorupsi. Jika karakter yang dibangun tidak antikorupsi, maka pendidikan antikorupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi sangat penting untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang dapat merugikan banyak pihak. Karakter antikorupsi akan muncul dari kesadaran yang demikian. Pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas generasi muda yang memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dalam kondisi korupsi saat ini yang begitu mendarah daging dan mengakar, pendidikan antikorupsi melalui pembangunan pembangunan karakter antikorupsi menjadi tantangan yang signifikan. Tetapi pembentukan karakter antikorupsi ini harus terus dilakukan sebagai sarana penanggulangan korupsi di masa mendatang. Ini akan mengembalikan nilai-nilai antikorupsi dengan membentuk kembali karakter antikorupsi generasi muda, sehingga membantu pencegahan korupsi di masa depan.

KESIMPULAN

Saat ini korupsi di Indonesia sangat marak terjadi, tidak hanya korupsi tapi juga kolusi dan pungli juga marak terjadi. Korupsi, pungli dan kolusi sama-sama mengancam kesatuan dan persatuan Negara, hal tersebut terjadi karena ketiga perilaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, mengurangi wibawa negara dan pemerintah, serta menjadikan biaya ekonomi tinggi karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara.

Pada prinsipnya, korupsi adalah perbuatan yang secara umum dilakukan dengan maksud mencari keuntungan. Suap, pemerasan, gratifikasi, dan taktik tidak etis lainnya sering digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan ini. Dalam upaya membrantas korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.

SARAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian korupsi, bagaimana korupsi di Indonesia, dampak korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi untuk mencegah korupsi maka dapat memunculkan saran yaitu, perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengharuskan setiap sekolah atau perguruan tinggi untuk mengajarkan Pendidikan

⁵ Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Hal 23.

Anti Korupsi. Dan masyarakat juga harus tau apa itu korupsi dan apa dampak buruknya karena korupsi sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial dapat mempersempit ruang gerak korupsi dan memperluas ruang gerak anti korupsi jika masyarakat lebih berperan serta dalam pencegahan kejahatan. Korupsi dapat terus ditekan dengan laju pertumbuhan yang teratur, sehingga upaya penyadaran masyarakat akan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Saifulloh, Putra Perdana. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Aanti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47(4).
- Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Aanti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2(1).
- Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2).
- Kadir, Yusrianto. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, Vol 1(1).